

**LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) TRIWULAN I
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



Oleh
Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.
Rizki Gayatri, S.Hum.
Asry Kurniawaty, S.S.
Desi Rachmawati, S.Pd.
Titik Susiawati, A.Md.

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2023

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga laporan pengawasan dan evaluasi Prosedur Operasional Standar (POS) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan I dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan ini merupakan sebuah upaya nyata untuk melakukan perbaikan internal lembaga. Kegiatan evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari maklumat kesanggupan mengikuti ZI-WBK. Kegiatan yang dimaksud analisis bagian dalam proses yang dilakukan dalam menjalan tupoksi lembaga.

Kegiatan ini berusaha memberikan deskripsi seperti apa Prosedur Operasional Standar (POS) yang sudah dilaksanakan. Lebih lanjut, dengan adanya kegiatan ini, secara internal Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat mengetahui ketepatan pelaksanaan dan alur, kesesuaian pelaksanaan dan prosedur yang diharapkan, dan saran perbaikan alur dan pelaksanaan prosedur operasional standar (POS) yang harus dilengkapi.

Harapan kami, semoga hasil kegiatan ini mempunyai nilai guna dan manfaat bagi pembangunan bangsa dan negara terutama dalam bidang tata laksana prosedur operasional standar (POS).

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
BAB I	3
PENDAHULUAN.....	3
1. Latar Belakang.....	3
2. Maksud dan Tujuan	3
3. Manfaat	4
4. Dasar Hukum	4
BAB II.....	6
METODE	6
1. Tahapan Kegiatan	6
2. Variabel.....	6
BAB III	8
HASIL EVALUASI	8
BAB IV	10
PENUTUP.....	10
1. Simpulan	10
2. Saran.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tugas dan fungsi sebagai lembaga yang melakukan kajian, pemasyarakatan, dan perlindungan bahasa dan sastra di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban memberikan pelayanan kebahasaan dan kesastraan. Untuk melakukan tugas dan fungsi tersebut, kantor membuat prosedur pelaksanaan dalam melakukan kegiatan tersebut. Dengan demikian, seluruh Prosedur Operasional Standar (POS) yang ada perlu untuk dievaluasi dan dilakukan perbaikan secara internal supaya dapat berguna secara maksimal dalam melakukan tugas dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat.

Sampai saat ini tahapan penyusunan POS didasarkan atas analisis kebutuhan, pengembangan, dan penerapan POS. Untuk melihat efektifitas pelaksanaan POS perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) POS. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan POS benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari serta untuk mengetahui mana POS yang perlu dilakukan revisi/penyusunan POS baru dan POS yang sudah tidak relevan/berlaku lagi.

2. Maksud dan Tujuan

Laporan ini adalah aplikasi dari kegiatan monitoring dan evaluasi atas implementasi POS di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Catatan di dalam laporan ini berusaha untuk mengetahui dan menilai implementasi Prosedur Operasional Standar (POS) Triwulan I Tahun 2023 di lingkungan

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

3. Manfaat

Kegiatan ini memiliki manfaat yang secara langsung dapat mengubah prosedur yang telah diterapkan menjadi lebih baik. Perubahan yang dimaksud adalah perbaikan pada tahap-tahap tertentu atau bahan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan.

4. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa; dan (3) surat keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 0107/I5.18/LK.06.00/2023. Kuesioner ini adalah alat penilaian bagi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengetahui dan menilai implementasi Prosedur Operasional Standar (POS) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 125/M/2021 tentang
Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

BAB II METODE

1. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan pengawasan dan evaluasi mencakup persiapan, pelaksanaan, pengolahan data, dan penyusunan laporan. Mekanisme monitoring dan evaluasi POS unit kerja dilaksanakan dengan:

- a. Melakukan pengawasan, penilaian dan pemeriksaan atas pelaksanaan POS Kantor Bahasa Provinsi NTB
- b. Merumuskan strategi dan langkah-langkah yang terkoordinasi, cepat dan terintegrasi, termasuk saran perbaikan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan POS
- c. Menerima, menelaah, dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan POS.
- d. Melaksanakan diskusi dan tanya jawab kepada pemegang kepentingan sehubungan dengan pelaksanaan POS
- e. Selanjutnya dibuat matriks sandingan POS semula dan POS menjadi. Mendata POS yang dinilai tidak relevan atau kurang fleksibel untuk diterapkan saat ini, POS baru yang sesuai kondisi saat ini atau lebih fleksibel untuk diterapkan terkait efisiensi waktu pelaksanaan, pelaksana tugas, syarat, mutu baku, dsb.

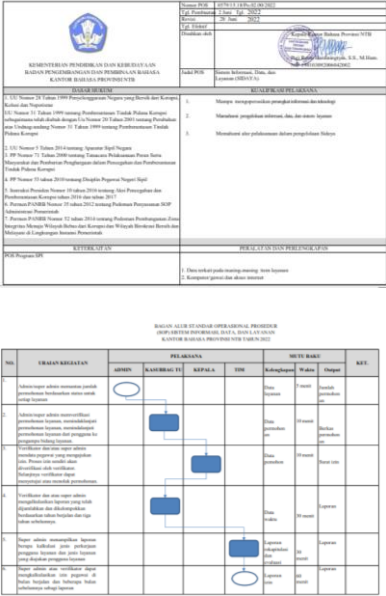
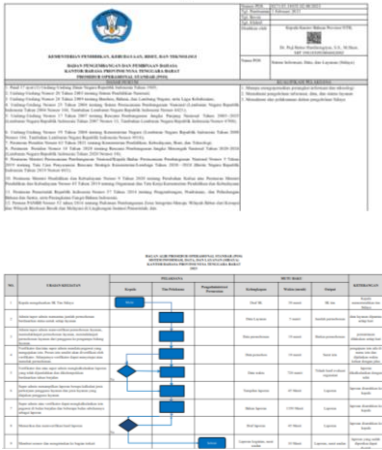
2. Variabel

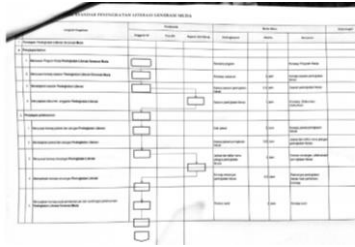
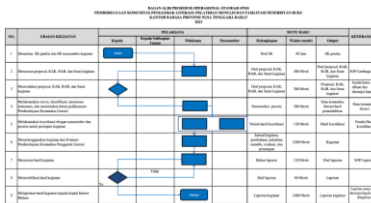
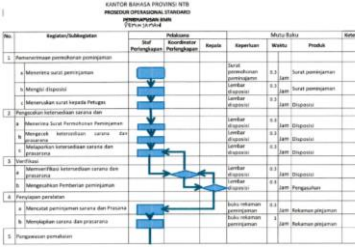
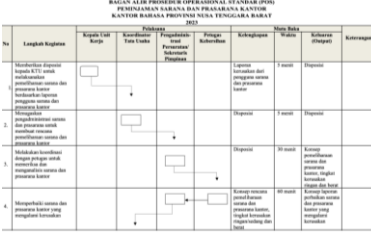
Kegiatan pengawasan dan evaluasi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Prosedur Operasional Standar (POS) Triwulan I tahun 2023 menggunakan 10 variabel dengan empat indikator. Kesepuluh variabel tersebut adalah ketepatan, bagan alur, waktu, keharusan, kesesuaian, tupoksi, maklumat, penanganan, perbaikan, dan alur kerja. Indikator yang digunakan adalah usia, jenis kelamin, bidang, dan

jabatan/fungsional. Penyusunan laporan kegiatan mengikuti pedoman penyusunan laporan. Pedoman yang dimaksud terdiri atas pendahuluan, metode, hasil, dan penutup.

BAB III HASIL EVALUASI

POS Kantor Bahasa Provinsi NTB pada tahun 2022 berjumlah 74 POS. POS tersebut merangkum kegiatan administrasi dan teknis Kantor Bahasa Provinsi NTB. Namun, POS yang telah dibuat tidak disusun dengan rapi dan menunjukkan tabel yang saling tempel. Hal tersebut diperbaiki pada penyusunan POS Tahun 2023. Pada tahun 2023 per Bulan Mei telah terkumpul 86 POS. POS yang disusun juga ada yang perlu dihapus, di antaranya adalah POS Penyusunan Bahan Ajar dan Penyusunan Soal UKBI. POS tersebut dihapus karena di Kantor Bahasa Provinsi NTB tidak lagi memiliki jabatan peneliti. Kemudian evaluasi difokuskan ke POS layanan di Kantor Bahasa Provinsi NTB dan POS Inovasi Kantor Bahasa Provinsi NTB.

No.	Pos Semula	Pos Menjadi	Keterangan
1.	POS Inovasi 	POS Inovasi 	POS Sidaya pada tahun 2022 masih menggunakan tanda tangan basah dengan logo serta dasar hukum yang masih belum diperbaharui. Kemudian bagan alirnya sudah lebih detail dan jelas.
2.	POS Layanan	POS Layanan	Dalam POS layanan, terlihat perubahan durasi penyelesaian pengerjaan. Waktu penyelesaian

	 	 	pengerjaan dijadikan dalam satuan menit. Selain itu bagan yang ditampilkan lebih rapi.
3	POS Administrasi  	POS Administrasi  	Kemudian POS administrasi telah menyesuaikan dengan Kepmendikbudrist ek Nomor 125/M/2021.

BAB IV PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi implementasi Prosedur Operasional Standar (POS) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan I dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Prosedur Operasional Standar (POS) yang dimonitoring dan dievaluasi mudah didapat dan sudah diterapkan tetapi masih perlu dilakukan sosialisasi agar POS bisa sampai kepada seluruh pegawai yang ada. Diharapkan dengan monitoring dan evaluasi POS, tata kerja dan proses kerja di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB makin efektif. POS yang sesuai tugas dan fungsi dapat mendorong pelaksanaan pekerjaan yang jelas dan terukur, menjadi dasar untuk penyusunan target kinerja individu. Kemudian, perlu dilakukan reviu, secara berkala terhadap POS yang telah ada dengan melihat implementasi dan praktik di lapangan sehingga dapat diketahui apakah POS yang telah disusun memang sesuai dengan aktifitas operasionalnya sehingga dapat disimpulkan apakah diperlukan pengembangan dan penyempurnaan.

2. Saran

Berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Prosedur Operasional Standar (POS) triwulan I tahun 2023 dapat disampaikan rekomendasi berikut ini.

- a. Perbaikan data Prosedur Operasional Standar (POS) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
- b. Penghapusan Prosedur Operasional Standar (POS) yang sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.